

Analisis implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi =  
Implementation analysis of re-arrangement and re-construction joint tower telecommunication policy for collecting permit charges of tower telecommunication building in Bekasi Regency

Winda Mauhidlotul Khoiroh, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20330587&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran atau diskripsi mengenai implementasi Kebijakan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati No 21 tahun 2010 serta pengaruhnya dalam pemungutan retribusi IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi IMB masih belum berjalan dengan efektif karena faktor faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi sumber sumber kecenderungan kecenderungan dan birokrasi masih belum berfungsi dan berjalan dengan baik. Pada akhirnya hal ini mendorong banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB sehingga retribusi IMB menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan secara optimal.

.....This research focused on implementation of re arrangement and re construction of joint tower telecommunication policy for collecting charges of tower telecommunication building permit in Bekasi Regency. The study describe how re arrangement and re structurisation of tower telecommunication policy had been implemented in Bekasi Regency as mentioned in the law of Re arrangement and Re construction joint tower telecommunication policy Number 21 2010 and also how this policy implementation has influenced the collecting charges of tower telecommunication building permit in Bekasi Regency This research report used qualitative method through field study and literature study for data collections.

The result shows that the implementation of re arrangement and re structurisation of tower telecommunication policy for Collecting Charges of Tower Telecommunication Building Permit in Bekasi Regency is not effective because implementation factors like communication resource beureaucracy and pasion does not have a maximal funtion or still in adapting proces In the end it has influenced for many tower telecommunications are built without permit from the government so the permit charges of tower telecommunication building in Bekasi Regency could not collected.